

**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS IBUKOTA NEGARA
JAKARTA MENJADI DAERAH KHUSUS BERDASARKAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DENDY SETIAWAN

NIM: 05020722054



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dendry Setiawan
NIM : 05020722054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Perubahan Status Ibukota Negara
Jakarta Menjadi Daerah Khusus Berdasarkan AUPB

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 April 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Dendry Setiawan
NIM. 05020722054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dendy Setiawan

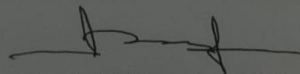
NIM : 05020722054

Judul : Tinjauan Yuridis Perubahan Status Ibukota Negara Jakarta Menjadi Daerah Khusus Berdasarkan AUPB

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 April 2026

Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dendy Setiawan

NIM : 05020722054

Judul : Analisis Yuridis Perubahan Status Ibukota Negara Jakarta Menjadi Daerah Khusus Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

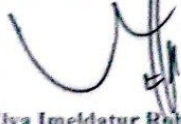
Penguji I



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji III



Eiva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

Penguji II



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 23 April 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Sugiyah Mukafalah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Dendy Setiawan**
NIM : 05020722054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
E-mail address : lioneldendy10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS IBUKOTA NEGARA JAKARTA MENJADI DAERAH KHUSUS
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juni 2026

Penulis

(M. DENDY SETIAWAN)

ABSTRAK

Perubahan status Jakarta dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta merupakan konsekuensi yuridis dari pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Perubahan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 jo Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait fungsi, kewenangan, dan kedudukan Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perubahan status tersebut berdasarkan hukum positif serta menilai kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 2 Tahun 2024, UU No. 151 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deduktif dengan menjadikan AUPB sebagai dasar pengujian terhadap kebijakan perubahan status Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus membawa implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam penyesuaian struktur pemerintahan daerah, perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pergeseran fungsi Jakarta dari pusat pemerintahan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Jakarta tetap merupakan daerah otonom dengan kekhususan tertentu yang bersifat asimetris, namun tetap mempertahankan prinsip demokrasi lokal. Dari perspektif AUPB, perubahan status tersebut telah memenuhi asas legalitas karena memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan, khususnya terkait penerapan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari belum optimalnya peraturan pelaksana, potensi tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan transparansi dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan penerapan prinsip-prinsip AUPB agar perubahan status Jakarta dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori.....	12
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	17
BAB II TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	22
A. Teori kebijakan Publik	22
B. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan.....	25
BAB III	33
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI DAERAH KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2024	33
A. Sejarah Jakarta Menjadi Ibu Kota	33

B. Perubahan Status Ibukota Menjadi Daerah Khusus Berdasarkan Undang-Undang NO 2 TAHUN 2024 jo UU NO 151 TAHUN 2024.....	36
C. Implikasi Yuridis Perubahan Status Ibukota Jakarta Menjadi Daerah Khusus.....	40
1) Dampak Yuridis Terhadap Struktur Pemerintahan Daerah.....	40
2) Perubahan Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	43
BAB IV.....	49
PERUBAHAN STATUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI DAERAH KHUSUS BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	49
A. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik / UU No 30 Tahun 2014.....	49
B. Perubahan Status Ibukota Jakarta Menjadi Daerah Khusus Berdasarkan AUPB	57
C. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Perubahan Status Ibukota Jakarta Menjadi Daerah Khusus Berdasarkan AUPB	61
BAB V.....	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace." *Journal of Multidisciplinary Studies* (Kuningan) 09 (2022): 64.
- Ali, Nurazhimah, and Syarifah Zulyaka Rifera Rozi. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (January 2026): 114. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v5i01.4681>.
- Alifa, Nur, Ayunda Eka Permata, Shella Rizki Junizar, and Valentina Dona Agnesia. *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Kemitraan Pemerintah Dan Sektor Privat Di Era Keterbukaan Informasi*. (Mojokerto), 2026, 78.
- Beni, Rozi. "Peran Baru Dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (June 2024). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1621>.
- Boele-Woelki, Katharina. "The Principles of European Family Law: Its Aims and Prospects." *Utrecht Law Review* 1, no. 2 (December 2005): 160. <https://doi.org/10.18352/ulr.13>.
- Chandra, Febrian, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, and Tiara Ananda. "Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (July 2025): 284. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>.
- Citrawali, Andi, and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng. "Interaksi Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dan Kearifan Lokal: Menciptakan Harmoni Dalam Pembangunan Kota." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (January 2025): 167. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1240>.
- Converse, Philip E. "A Framework for Political Analysis. By David Easton. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1965. Pp. Xiv, 143. \$4.95)." *American Political Science Review* 59, no. 4 (December 1965): 1001–2. <https://doi.org/10.2307/1953219>.
- Cuber, John F., and George R. Geiger. "Philosophy and the Social Order." *American Sociological Review* 13, no. 1 (February 1948): 110. <https://doi.org/10.2307/2086765>.

- Diana, Juan Matheus, and Hizkia Ivan Nugroho. "Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective." *Journal of Constitutional and Governance Studies* 1, no. 1 (June 2024): 20–37. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art2>.
- . "Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective." *Journal of Constitutional and Governance Studies* 1, no. 1 (June 2024): 37. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art2>.
- Djou, Ana Maria Gadi, Sri Hartati, and Heri Budianto. *Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. (Semarang), 2024, 77.
- Fahmi, Moch. *Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung) 1, no. 1 (2025): 89.
- Falleti, Tulia G. "A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective." *American Political Science Review* 99, no. 3 (August 2005): 327–46. <https://doi.org/10.1017/S0003055405051695>.
- Fauziah, Siti Sa'adah. *Kewenangan Khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta*. (Bandung), 2024, 98.
- Friesen, Jeff. "Introduction to Public Policy." *Dalhousie University* (Nova Scotia Canada) 2 (2023): 34–39.
- Guntur, Muhammad. *Analisis Kebijakan Publik*. (Makassar), 2021, 95.
- Halomoan, Kristianto Pustaha. "Transformasi Jakarta Menjadi Daerah Khusus: Peta Kebijakan Dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Perkotaan* 16, no. 1 (August 2024): 60. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v16i1.5711>.
- Hayati, Misbahul. *Implementasi Penerapan Asas Pelayanan Publik Yang Baik Dalam Meningkatkan Kinerja Di Kantor Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat*. (Lampung), 2023, 67.
- Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (March 2022): 30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>.
- Islamy, Muh Irfan. *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. (Jakarta), 2022, 76.

- Kurhayadi, Kurhayadi. "Public Policy Implementation: A Theoretical Review." *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 1 (January 2023): 10–18. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23742>.
- Lathifah, Hilma, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti. *Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi*. Desember 2024, 56.
- Lazuardito, Muhammad Rizky. *Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara*. (Yogtakarta), 2024, 87.
- Nashar, Abdul. *Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi : Etika, Kepemimpinan, Dan Akuntabilitas Pubik*. Pekanbaru, 2025.
- Osborne, Stephen P. "The New Public Governance?¹." *Public Management Review* 8, no. 3 (September 2006): 377–87. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>.
- Palmer, Norman D. "How Nations Negotiate. By Fred Charles Iklé. (New York: Harper & Row, 1964. Pp. Xii, 274. \$5.95)." *American Political Science Review* 59, no. 3 (September 1965): 705–6. <https://doi.org/10.2307/1953189>.
- Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>.
- Priono, Utami, Dinar Anggia Putri, and Agoestina Mappadang. *Peran Pengawasan dan Program Efisiensi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif Good Governance*. (Jakarta), 2025, 98.
- Putri, Ananda Meilia. "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Kedudukan Daerah Khusus Jakarta." Jakarta, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84485/1/Skripsi%20Ananda%20Meilia%20Final%20CD.pdf>.

Buku

- Ritonga, Joni Sandri. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. (Tebing Tinggi), January 25, 2025, 25.
- Saprii, Rahmat Bijak Setiawan, Axcel Deyong Aponno, and Ahmad Reihan Thoriq. "Pengaturan Pengangkatan Wali Kota/Bupati Oleh Gubernur: Pra Dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta: Regulation of the Appointment and Dismissal of Mayors/Regents by the Governor: Before and After the Enactment of the Special Region of Jakarta Law."

JAPHTN-HAN 4, no. 2 (November 2025): 85.
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i2.193>.

Sari, Hikma Dian. *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*. (Sidenreng Rappang), 2022, 89.

Septiana, Anis Ribcalia. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. (Padang), 2023, 76.

Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 2015): 67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.

Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (August 2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

Suriadi, Hari. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi*. (Padang) 1, no. 1 (2025): 45.

Tarumingkeng, Rudy C. *Reinventing Government*. (Bogor, Indonesia), April 27, 2025, 127.

Ulhaq, Mhd Jundi Zia, and Muhammad Darwis. *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. 2, no. 1 (2023).

Uzdah, Nadya, Vivia Salsabila, Kristo Saputra, Mochamad Isa Dharmaputra, Regina Santa, Yosephine, Febe Christanta, Astrid Genius Natalia, Yessi Evani, and Yohana Ditia Limbong. "Analysis of Governance System and Authority Distribution in DKI Jakarta: A Study of Government Structure and Electoral System." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 3, no. 01 (February 2024): 42–50. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15483>.

Wiratman, Herlambang P. "Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Perkara Tata Usaha Negara." *Judicial Sector Support Program* (Jakarta), 2022, 35–38.

Zaelani, Muhammad Aziz, I. Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, and Isharyanto Isharyanto. "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2021): 57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>.

Zamroni, M. "General Principles of Good Governance in Indonesia: What Are The Legal Bases?" *Varia Justicia* 15, no. 1 (March 2019): 1–8. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Undang-Undang NO 30 TAHUN 2014.

Undang-Undang NOMOR 2 TAHUN 2024.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Undang-Undang NOMOR 151 TAHUN 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A